

# MANAJEMEN PEMBIAYAAN PADA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Anis Nursobah  
STAINU Kota Tasikmalaya  
[aniesnursobah@gmail.com](mailto:aniesnursobah@gmail.com)

## Abstrak

Biaya adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam pendidikan. Pendidikan dapat terselenggara secara optimal jika didukung oleh biaya yang memadai. Tanpa biaya yang memadai, pendidikan akan sulit berkembang. Biaya tersebut diperuntukan pada komponen-komponen pendidikan seperti ruang kelas, ruang kantor, ruang perpustakaan, media pembelajaran, laboratorium, perangkat computer, honorarium guru pegawai dan lain-lain. Manajemen pembiayaan dalam pendidikan dapat diartikan sebagai kegiatan mengelola keuangan secara profesional dan proporsional untuk dialokasikan terhadap program-program pelaksanaan operasional pendidikan. Karena tujuan manajemen pendidikan itu sendiri adalah penggunaan dana atau anggaran dapat dilakukan secara efisien dan efektif, guna mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Sedangkan fungsi manajemen pembiayaan pendidikan secara umum adalah penganggaran, pembukuan dan pengawasan. Pembiayaan pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses pengalokasian sumber-sumber pada kegiatan operasional pendidikan, meliputi perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan anggaran pendidikan, akuntansi dan pemeriksaan atau pengawasan anggaran pendidikan. Penganggaran merupakan proses pengambilan keputusan untuk mengatur pemakaian sumber daya pada masa yang akan datang. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber pembiayaan dalam pendidikan adalah pendapatan lembaga pendidikan yang berasal dari pemerintah, orang tua peserta didik dan masyarakat. Kegiatan manajemen pendidikan meliputi penganggaran, pembukuan atau penatausahaan serta pemeriksaan atau penilaian.

**Kata kunci: Manajemen, pembiayaan, lembaga pendidikan Islam**

## Pendahuluan

Biaya adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam pendidikan. Pendidikan dapat terselenggara secara optimal jika didukung oleh biaya yang memadai. Tanpa biaya yang memadai, pendidikan akan sulit berkembang. Biaya tersebut diperuntukan pada komponen-komponen pendidikan seperti ruang kelas, ruang kantor, ruang perpustakaan, media pembelajaran, laboratorium, perangkat computer, honorarium guru pegawai dan lain-lain.

Biaya pendidikan sangatlah penting. Untuk itu, biaya atau dana harus diusahakan oleh para pelaku pendidikan secara kreatif, bukan hanya mengandalkan pemerintah dan orang tua wali murid, tetapi juga harus mapu menggali dari sumber lain yaitu masyarakat, baik secara individu atau kelompok, atau atas nama perusahaan dan sejenisnya dalam bentuk bantuan sukarela/hibah melalui zakat, infak, sodakoh, wakaf dan lain-lain.

Dalam pelaksanaannya pembiayaan untuk pendidikan harus dapat dikelola secara baik dan benar, profesional dan proporsional. Artinya biaya yang memadai bahkan lebih, tidaklah cukup bagi terselenggaranya pendidikan yang baik dan bermutu, jika tidak ditunjang dengan pengetahuan dan kemampuan dalam manajemen.

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm 4

<sup>6</sup> Anwar, Biaya Pendidikan, Jakarta, Mimbar Pendidikan, 1991 hlm 30

<sup>7</sup> Yeti Heryati & Mumuh Muksin, Manajemen Sumber daya Pendidikan, Bandung, Pustaka Setia, 2014 hlm 53

Manajemen pembiayaan dalam pendidikan dapat diartikan sebagai kegiatan mengelola keuangan secara profesional dan proporsional untuk dialokasikan terhadap program-program pelaksanaan operasional pendidikan. Karena tujuan manajemen pendidikan itu sendiri adalah penggunaan dana atau anggaran dapat dilakukan secara efisien dan efektif, guna mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Sedangkan fungsi manajemen pembiayaan pendidikan secara umum adalah penganggaran, pembukuan dan pengawasan.

### **Metodologi penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, adalah metode deskriptif analitis, yaitu suatu metoda penelitian yang melukiskan secara sistematis, fakta atau peristiwa tertentu secara faktual dan cermat. Dan juga metode penomenologi, yang mengungkapkan informasi yang diterima menjadi satu kesatuan penafsiran. Penelitian inipun tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang sehingga dapat dirumuskan pola – pola pengembangan di masa yang akan datang. Alasan menggunakan metode deskriptif ini yaitu untuk memberikan gambaran secara empirik pada masa sekarang tentang data-data yang diteliti, kemudian dari data yang diperoleh di susun secara sistematis dan dianalisis secara logis.

### **Pembahasan**

Secara bahasa kata manajemen berasal dari kata to manage (Bahasa Inggris) yang berarti mengatur, mengurus atau mengelola.<sup>1</sup> Menurut istilah, banyak sekali definisi yang telah dilontarkan oleh para ahli, diantaranya memberikan rumusan bahwa manajemen yaitu Proses untuk mencapai tujuan–tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari empat fungsi utama yaitu merencanakan (planning), mengorganisasi (organizing), memimpin (leading), dan mengendalikan (controlling).<sup>2</sup> Dengan demikian, manajemen adalah sebuah kegiatan yang berkesinambungan. Sedangkan menurut Mujamil Komar, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi pekerjaan organisasi dan untuk menggunakan semua sumber daya organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang telah digariskan.<sup>3</sup>

Manajemen pendidikan adalah rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan di lingkungan tertentu, terutama berupa lembaga pendidikan formal.

Mulyani A. Nurhadi manajemen Pendidikan merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk manusia. Rangkaian kegiatan itu merupakan suatu proses pengelolaan dari suatu rangkaian kegiatan pendidikan yang sifatnya kompleks dan unik yang berbeda dengan tujuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.<sup>4</sup> Tujuan pendidikan ini tidak terlepas dari pendidikan secara umum dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh suatu bangsa. Proses pengelolaan itu dilakukan oleh sekelompok manusia yang tergabung dalam suatu organisasi sehingga kegiatannya harus dijaga agar tercipta kondisi kerja yang harmonis tanpa mengorbankan unsur-unsur manusia yang terlibat dalam kegiatan pendidikan ini. Proses itu dilakukan dalam rangka mencapai satu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dalam hal ini meliputi tujuan yang bersifat umum dan yang diemban oleh tiap-tiap organisasi pendidikan (skala tujuan khusus). Proses pengelolaan itu dilakukan agar tujuannya dapat tercapai secara efektif dan efisien.

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm 4

<sup>6</sup> Anwar, Biaya Pendidikan, Jakarta, Mimbar Pendidikan, 1991 hlm 30

<sup>7</sup> Yeti Heryati & Mumuh Muksin, Manajemen Sumber daya Pendidikan, Bandung, Pustaka Setia, 2014 hlm 53

Pembiayaan adalah pengalokasian sumber-sumber pada kegiatan-kegiatan atau program-program tertentu. Pembiayaan pendidikan adalah proses pengalokasian sumber-sumber pada kegiatan-kegiatan atau program-program pelaksanaan operasional pendidikan.<sup>5</sup>

Pembiayaan pendidikan adalah kemampuan interval sistem pendidikan untuk mengelola dana-dana pendidikan secara efisien. Pembiayaan pendidikan adalah sebagai nilai rupiah dari seluruh sumber daya (input) yang digunakan untuk suatu kegiatan pendidikan. Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisa sumber, tetapi juga menggunakan dana secara efisien. Semakin efisien sistem pendidikan itu semakin kurang pula dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya dan lebih banyak yang dicapai dengan anggaran yang tersedia.<sup>6</sup>

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Kegiatan yang ada dalam manajemen pembiayaan meliputi tiga hal, yaitu: penganggaran (Budgeting), pencatatan atau pembukuan (Accounting), dan pemeriksaan (Auditing).

Tujuan kegiatan manajemen pendidikan adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan operasional kependidikan dalam mencapai tujuan pendidikan.

Sedangkan fungsinya adalah perencanaan (planning), Pengorganisasian (organization), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling) dalam operasional pendidikan.<sup>7</sup>

Melalui kegiatan manajemen pembiayaan, kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaanya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program pendidikan secara efektif dan efesiens, tujuan manajemen pembiayaan pendidikan adalah

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan keuangan pendidikan
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan pendidikan
3. Meminimalisir penyalahgunaan anggaran pendidikan

Adapun fungsi pembiayaan dalam pendidikan secara umum meliputi Penganggaran (budgetting), pencatatan atau pembukuan (accounting) dan pemeriksaan atau pengawasan (auditing).

#### A. Prinsip-prinsip Manajemen

Pembiayaan Pendidikan Manajemen pembiayaan pendidikan atau manajemen keuangan sekolah harus memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-Undang No.20 tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. Di samping itu, prinsip efektifitas juga perlu mendapatkan penekanan.

Transparansi berarti adanya keterbukaan. Transparan dalam bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Pada lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya yang jelas sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan untuk meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Di samping itu,

<sup>5</sup> Ibid, hlm 4

<sup>6</sup> Anwar, Biaya Pendidikan, Jakarta, Mimbar Pendidikan, 1991 hlm 30

<sup>7</sup> Yeti Heryati & Mumuh Muksin, Manajemen Sumber daya Pendidikan, Bandung, Pustaka Setia, 2014 hlm 53

transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik Antara pemerintah, masyarakat, orangtua siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orangtua siswa, misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dapat ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga siapa pun yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua siswa dapat mengetahui berapa jumlah uang yang diterima sekolah dari orang tua siswa dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah.

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas dalam manajemen keuangan sekolah berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku, pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orangtua, masyarakat, dan pemerintah.

Ada tiga pilar utama yang menjadi prasarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu:

- Transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah.
- Standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya
- Partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.

Efektif sering diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garner (2004) mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi karena efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai, tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. Effectiveness “characterized by qualitative outcomes”.

Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif outcomes. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas jika kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomesnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Garner mendefinisikan efisiensi sebagai “characterized by quantitative outputs” (garner, 2004). Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik Antara masukan (input) dan keluaran (output) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu dan biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal berikut:

a. Dilihat dari segi penggunaan waktu

Dilihat dari segi penggunaan waktu tenaga dan biaya : kegiatan dapat dikatakan efisien jika penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan. Ragam efisiensi dapat dijelaskan melalui hubungan antara penggunaan waktu, tenaga, biaya dan hasil yang diharapkan.

b. Dilihat dari segi hasil

Kegiatan dapat dikatakan efisien apabila dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya, baik kuantitas

maupun kualitasnya. Tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi memungkinkan terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat secara memuaskan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.<sup>8</sup>

Konsep Dasar Pembiayaan Pendidikan. Dalam kegiatan umum manajemen pembiayaan pendidikan meliputi tiga hal, yaitu: budgeting (penggaran), accounting (pembukuan), dan auditing (pemeriksaan).

#### 1. Budgeting (Penganggaran)

Penganggaran merupakan suatu proses pengambilan keputusan pemakaian sumber daya pada masa yang akan datang. Penganggaran dapat juga dikatakan sebagai kegiatan atau proses penyusunan anggaran (budget). Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam kurun waktu tertentu. Sehingga dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga.

Penyusunan anggaran merupakan langkah-langkah positif untuk merealisasikan rencana yang telah disusun. Kegiatan ini melibatkan pimpinan tiap-tiap unit organisasi. Pada dasarnya, penyusunan anggaran merupakan negosiasi atau perundingan/ kesepakatan antara puncak pimpinan dengan pimpinan di bawahnya dalam menentukan besarnya alokasi biaya suatu penganggaran. Hasil akhir dari suatu negosiasi merupakan suatu pernyataan tentang pengeluaran dan pendapatan yang diharapkan dari setiap sumber dana.

Penganggaran merupakan proses kegiatan atau proses penyusunan anggaran (budget). Budget ini merupakan ini merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu.<sup>9</sup> Sementara kalau anggaran sector public adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sector publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas.

Dengan pengertian tersebut mengungkapkan peran anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik. Organisasi sector public tentu berkeinginan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat tetapi sering terkendala oleh keterbatasan sumber daya yang dimiliki, maka anggaran memiliki fungsi dan peran penting.

Anggaran dapat dikatakan juga sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu dalam ukuran finansial. Penganggaran sektor public berbeda dengan perusahaan swasta. Karena penganggaran sector public lebih banyak muatan politis sedangkan perusahaan swasta relative lebih kecil muatan politisnya. Selain itu bagi sector public anggaran tidak hanya sebagai sebuah rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya.

##### a. Karakteristik Anggaran

Anggaran memiliki dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan pengeluaran. Sisi pengeluaran menggambarkan perolehan atau besarnya dana yang diterima oleh lembaga dari setiap sumber dana yang diterima oleh lembaga dari setiap

---

<sup>9</sup> Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Islam, Bandung, Remaja rosdakarya, 2013 hlm141

sumber dana, misalnya dari pemerintah, masyarakat, orang tua peserta didik dan sumber-sumber lainnya. Sedangkan sisi pengeluaran menggambarkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk tiap komponen prog-ram. Istilah-istilah yang lazim untuk pengeluaran anggaran adalah dana rutin dan dana pembangun.<sup>10</sup>

b. Fungsi Anggaran

Anggaran disamping sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian manajemen, juga merupakan alat bantu bagi manajemen dalam mengarahkan suatu organisasi dalam posisi yang kuat atau lemah. Sementara beberapa fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik, Anggaran adalah sebagai alat:

- Perencanaan
- Kebijakan
- Pengendalian
- Politik
- Koordinasi dan komunikasi
- Penilaian kinerja
- Motivasi<sup>11</sup>

c. Prinsip-prinsip dan Prosedur Anggaran

Prinsip-prinsip penyusunan anggaran apabila dikaitkan dengan anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian menurut Nanang Fattah (2000: 49) adalah sebagai berikut:

- Adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam system manajemen organisasi
- Adanya system akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran.
- Adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi
- Adanya dukungan dari pelaksana dari tingkat atas hingga yang paling bawah.

Sedangkan apabila prinsip-prinsip anggaran dikaitkan dengan peran dan fungsi anggaran sebagai pedoman bagi organisasi publik dan pemerintah adalah seperti dikemukakan, yaitu:

- Otorisasi oleh legislative
- Komprehensif/menyeluruh
- Keutuhan
- Nondiscretionary apropriasi, jumlah yang disetujui legislative harus termanfaatkan secara ekonomis
- Periodik
- Akurat
- Jelas
- Transparansi

Sedangkan prosedur penyusunan anggaran:

- Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama periode anggaran
- Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa dan barang

---

<sup>10</sup> Ibid, hlm 142

<sup>11</sup> Ibid, hlm 142

- Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan formal
- Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu
- Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang
- Melakukan revisi usulan anggaran
- Persetujuan revisi usulan anggaran
- Pengesahan anggaran <sup>12</sup>

d. Sumber–sumber Pembiayaan Pendidikan

Sistem Pendidikan Nasional ditetapkan melalui undang-undang berupa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 dan ditetapkan pada tanggal 27 Maret 1989. Pada bab VIII pasal 33-36 dijelaskan mengenai sumber daya pendidikan. Kategori pembiayaan pendidikan terdiri dari beberapa bagian:

- 1) APBN dan APBD merupakan biaya langsung yang terkait dengan penggajian guru, administrator, staf sekolah, pembelian peralatan, materi pelajaran dan gedung sekolah. Dana pendidikan selain gaji dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBD. Dana APBD berasal dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Dana tersebut tergantung pada kemampuan keuangan pemerintah setempat dan daerah lain. Dana pendidikan yang berasal dari APBD diperuntukkan sama dengan dana yang berasal dari APBN, yakni bisa untuk pendanaan rutin dan untuk pendanaan pembangunan, tergantung pada kebutuhan sekolah. Untuk pendanaan rutin contohnya membayar gaji guru bantu/tenaga honorer. Untuk pendanaan pembangunan direalisasikan untuk rehabilitasi gedung, sarana olahraga dan sejenisnya. Dana APBN pun dapat digunakan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang setiap daerah mendapatkan jatah yang sama dan dana APBD digunakan untuk Bantuan Operasional Pembangunan (BOP). Sedangkan dana rutin, yaitu dana yang dipakai membiayai kegiatan rutin seperti tambahan gaji guru, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, biaya pemeliharaan, dsb.
- 2) Dana Penunjang Pendidikan berupa beasiswa yang diterima oleh peserta didik untuk menunjang biaya pendidikannya.
- 3) Dana dari Masyarakat yang berupa bantuan/sumbangan BP3 (sekarang menjadi SPP) yaitu dana untuk peserta didik seperti untuk pembayaran seragam, buku, ATK, transport. Selain sumbangan SPP juga ada dana pembangunan, ialah dana yang dipakai membiayai pembangunan dalam berbagai bidang seperti sarana prasarana, alat belajar, media, dsb.
- 4) Sumbangan dari Pemerintah Daerah setempat ialah sumbangan yang diterima oleh sekolah dari pemerintah daerah setempat dimana sekolah tersebut berada.
- 5) Bantuan lain-lain adalah bantuan yang diterima oleh sekolah dari berbagai pihak selain APBN dan APBD, Dana Penunjang Pendidikan, Dana dari Masyarakat, Sumbangan dari Pemerintah Daerah setempat. Bantuan tersebut berasal dari kerjasama sekolah dengan instansi lain atau yang sejenis. Diantaranya ialah bantuan yang berasal dari luar negeri.

2. Accounting (Pembukuan)

Akunting adalah bahwa yang digunakan untuk menggambarkan hasil kegiatan ekonomi. Kegiatan tersebut melibatkan konversi (perubahan) sumber daya yang ada menjadi barang dan jasa yang bias dipakai. Oleh karena itu, akunting berkaitan dengan mengukur dan menyingkap hasil dari kegiatan konversi sumber daya tadi. Teknik yang digunakan adalah MBO (Management by Objective).

Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan finansial (keuangan) di dalam organisasi laba dan nirlaba.

Menurut Pendapat yang lain menjelaskan bahwa akuntansi merupakan proses pencatatan, pengelompokan dan pengikhtisaran kejadian-kejadian ekonomi dalam bentuk yang teratur dan logis dengan tujuan menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.<sup>13</sup> Fungsi akuntansi bagi badan usaha dan masyarakat adalah menyajikan informasi kuantitatif tertentu yang dapat digunakan oleh pimpinan entitas ekonomi maupun pihak lainnya untuk mengambil keputusan. Agar penyajian informasi tepat, maka seorang akuntan harus memiliki pengetahuan baik mengenai prinsip-prinsip dan aturan-aturan dalam penyusunan informasi akuntansi, dan mampu mengembangkan system yang dapat menjamin bahwa semua peristiwa ekonomi yang terjadi dalam organisasi dapat tercatat dengan mencukupi pada saat yang tepat dengan biaya yang pantas.

Kegiatan akuntansi memerlukan system akuntansi yang benar. Di dalam system akuntansi terdiri dari catatan-catatan akuntansi (buku cek, jurnal dan buku besar) serta serangkaian proses dan prosedur yang ditetapkan untuk staf, sukarelawan para professional. Tujuan system akuntansi ini adalah untuk memastikan bahwa data keuangan dan transaksi ekonomi diinputkan secara tepat ke dalam catatan akuntansi, serta laporan-laporan yang perlu disajikan secara akurat dan tepat waktu.<sup>14</sup>

Komponen-komponen system akuntansi, secara tradisional system akuntansi terdiri dari komponen-komponen berikut:

1. Bagan Perkiraan/Akun Bagan perkiraan adalah daftar masing-masing item, di mana pencatatannya di bagi ke dalam lima kategori:

- Aktiva
- Utang
- Aktiva bersih
- Pendapatan
- Belanja

Masing-masing pencatatan ditentukan dengan mengidentifikasi angka yang diinputkan ke system akuntansi.

2. Buku Besar

Buku besar mengklasifikasi informasi pencatatan, dimana bagan perkiraan atau akun bertindak sebagai daftar isi buku besar. Dalam system manual, ringkasan total dari seluruh jurnal dimasukkan ke dalam buku besar setiap bulannya dimana hal ini dilakukan selama satu tahun dan dilaporkan pada tanggal neraca. Dalam system terkomputerisasi, data secara khusus dimasukkan ke system sekali saja. Saat entri data telah disetujui oleh pemakai, perangkat lunak memasukkan informasi itu ke seluruh laporan, dimana angka yang dicatat akan muncul.

3. Jurnal

Jurnal digunakan untuk mencatat semua transaksi akuntansi, sebelum diklasifikasikan ke buku besar. Jurnal mengatur informasi secara kronologis dan sesuai dengan jenis transaksi. Contoh, jurnal untuk mencatat transaksi pengeluaran kas adalah suatu pencatatan secara kronologis atas cek yang ditulis, yang dikategorikan menurut bagan perkiraan/akun.

#### 4. Buku Cek

Buku cek menyajikan kombinasi jurnal dan buku besar. Sebagian besar transaksi keuangan akan dicatat melalui buku cek, dimana tanda penerimaan yang disetor ke dan dari saldo pembayaran akan dibuat.

Pengurusan ini meliputi dua hal yaitu, pertama mengurus hal yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. Pengurusan kedua menyangkut urusan tindak lanjut dari urusan pertama yaitu, menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang. Pengurusan ini tidak menyangkut kewenangan menentukan, tetapi hanya melaksanakan dan dikenal dengan istilah pengurusan bendaharawan. Bendaharawan adalah orang atau badan yang oleh Negara diserahi tugas menerima, menyimpan dan membayar, atau menyerahkan uang atau surat-surat berharga dan barang-barang termasuk dalam pasal 55 ICW (Indische Comptabiliteits Wet), sehingga dengan jabatan itu mereka mempunyai kewajiban atau pertanggungjawaban apa yang menjadi urusannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).<sup>15</sup>

#### 3. Auditing (Pemeriksaan)

Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan audit, diperlukan informasi yang dapat diverifikasi dan sejumlah standar (kriteria) yang dapat digunakan sebagai pegangan pengevaluasian informasi tersebut. Agar dapat diverifikasi, informasi harus dapat diukur. Informasi yang dapat diukur memiliki berbagai bentuk. Dalam auditing data akuntansi yang menjadi pokok adalah menentukan apakah informasi yang tercatat telah mencerminkan dengan benar kejadian ekonomi pada periode akuntansi. Oleh karena kriterianya adalah aturan-aturan akuntansi. Oleh karena kriterianya adalah aturan-aturan akuntansi, maka seorang auditor harus memahami aturan-aturan dimaksud dengan baik. Dalam audit laporan keuangan, aturan-aturan dimaksud adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam system akuntansi Indonesia, maka standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia).

##### 1. Jenis-Jenis Audit

###### 1) Audit Laporan Keuangan

Keuangan adalah Bertujuan menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan yang merupakan informasi terukur yang akan diverifikasi, telah disajikan dengan kriteria-kriteria tertentu. Asumsi dasar dari suatu laporan keuangan adalah bahwa laporan bahwa laporan tersebut akan lebih efisien mempekerjakan satu auditor untuk melaksanakan audit dan membuat kesimpulan yang dapat diandalkan oleh semua pihak daripada membiarkan masing-masing pihak melakukan audit sendiri-sendiri.

###### 2) Audit Operasional

Audit operasional merupakan penelaahan atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitasnya. Umumnya, pada saat selesainya audit operasional, auditor akan memberikan sejumlah saran kepada manajemen untuk memperbaiki jalannya operasi lembaga. Dalam audit operasional, tinjauan yang dilakukan tidak terbatas pada masalah-masalah akuntansi, tetapi juga meliputi evaluasi terhadap struktur organisasi, pemanfaatan computer, metode computer, metode produksi, pemasaran dan bidang-bidang lain sesuai dengan keahlian auditor.

### 3) Audit Ketaatan

Audit ini bertujuan mempertimbangkan apakah audit (klien), telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi. Suatu audit ketaatan

Perencanaan Anggaran dan Belanja Lembaga Pendidikan Islam.

Lembaga pendidikan merupakan sistem yang terdiri atas serangkaian komponen yang saling terkait, dan membutuhkan masukan dari lingkungan untuk melakukan proses transformasi serta mengeluarkan hasil. Salah satu cara berpikir, berkaitan dengan pengelolaan dana lembaga pendidikan adalah kreatif dan dinamis selaras dengan kebutuhan perkembangan yang terjadi di masyarakat dan lingkungan, yang dikenal dengan manajemen strategis. Tiga langkah utama pendekatan strategis dalam konteks manajemen yaitu:

1. Strategic planning sebagai dokumen formal.
2. Strategic management sebagai upaya untuk mengelola proses perubahan.
3. Strategic thinking sebagai kerangka dasar untuk merumuskan tujuan dan hasil yang dicapai secara berkesinambungan.<sup>16</sup>

Dalam perencanaan pembiayaan, terlebih dahulu harus memahami jenis-jenis biaya dalam istilah pembiayaan. Jenis-jenis biaya tersebut yaitu:

#### 1) Biaya langsung (direct cost)

Merupakan biaya pendidikan yang diperoleh dan dibelanjakan oleh sekolah sebagai suatu lembaga meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan proses belajar mengajar, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri.

#### 2) Biaya tidak langsung (indirect cost)

Biaya tidak langsung merupakan keuntungan yang hilang (earning forgone) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.

Istilah lain yang berkenaan dengan dua sisi anggaran yakni penerimaan dan pengeluaran. Anggaran penerimaan merupakan pendapatan yang diperoleh rutin setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi. Anggaran dasar pengeluaran Merupakan jumlah uang yang dibelanjakan setiap akhir tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah.

Berdasarkan sifatnya, pengeluaran dikelompokkan menjadi dua, antara lain:

#### 1. Pengeluaran yang bersifat rutin

Pengeluaran rutin di sekolah misalnya pengeluaran pelaksanaan pelajaran, pengeluaran tata usaha sekolah, pemeliharaan sarana/prasarana sekolah, kesejahteraan pegawai, administrasi, pembinaan teknis edukatif, pendataan.

#### 2. Pengeluaran yang bersifat tidak rutin/pembangunan

Contoh pengeluaran tidak rutin: pembangunan gedung, pengadaan kendaraan dinas, dan lain sebagainya.

Dalam mengukur biaya pendidikan ada yang dinamakan sebagai total cost dan unit cost. Total cost merupakan biaya pendidikan secara keseluruhan. Sedangkan unit cost adalah biaya satuan per peserta didik. Untuk menentukan biaya satuan terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan makro dan mikro. Pendekatan makro mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana kemudian dibagi jumlah murid. Sedangkan pendekatan mikro berdasar pada alokasi pengeluaran per komponen pendidikan yang digunakan peserta didik.

Untuk menyusun suatu perencanaan pembiayaan atau yang biasa disebut dengan rencana anggaran, hal-hal yang harus diperhatikan:

- a. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran.
- b. Mengidentifikasikan sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang.
- c. Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab uang pada dasarnya merupakan pernyataan financial.
- d. Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu.
- e. Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan pihak yang berwenang.
- f. Melakukan revisi usulan anggaran
- g. Persetujuan revisi anggaran
- h. Pengesahan anggaran

Penyusunan anggaran pembiayaan pendidikan. Manajemen keuangan selalu berpatokan pada sistem penganggaran, sedangkan penganggaran merupakan proses penyusunan anggaran (budgeting). Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam penganggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga. Dalam melaksanakan kegiatan penganggaran perlu dilakukan dengan baik dan bermusyawarah.

Merencanakan pada dasarnya menentukan kegiatan yang hendak dilakukan pada masa depan. Kegiatan ini dimaksud untuk mengatur sumber daya agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai secara efektif dan efisien.

Suatu lembaga pendidikan sebagai produsen jasa pendidikan secara teoritis menimbulkan konsep biaya yang sama dengan bidang-bidang aktivitas lainnya. Dana atau biaya pendidikan merupakan faktor yang penting dalam menghasilkan siswa yang berkualitas di suatu lembaga pendidikan (sekolah). Artinya lembaga pendidikan tersebut memerlukan dana yang akan dipergunakan dalam berbagai keperluan, yaitu untuk gaji tenaga kependidikan lainnya, gaji tenaga administrasi, biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana (ruang belajar, ruang laboratorium, perpustakaan, gedung dan fasilitas lainnya) serta biaya penyelenggaraan pendidikan, perluasan dan pengembangannya.

Penyusunan anggaran merupakan langkah-langkah positif untuk merealisasikan penggunaan pembiayaan. Kegiatan ini melibatkan pimpinan tiap-tiap unit organisasi. Pada dasarnya, penyusunan anggaran merupakan negosiasi atau kesepakatan antara pucuk pimpinan dengan bawahannya untuk menentukan besarnya alokasi biaya untuk suatu penganggaran. Hasil akhir dari suatu negosiasi

merupakan suatu pernyataan tentang pengeluaran dan pendapatan yang diharapkan dari sumber dana.

Dalam kaitannya dengan proses penyusunan anggaran ini, ada empat fase kegiatan pokok sebagai berikut:

- a) Merencanakan anggaran, yaitu kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis cost effectiveness, dan membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran.
- b) Mempersiapkan anggaran, yaitu menyesuaikan kegiatan dengan mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya, distribusi, dan sasaran program pengajaran perlu dirumuskan dengan jelas. Melakukan inventarisasi kelengkapan peralatan dan bahan-bahan yang telah tersedia.
- c) Mengelola pelaksanaan anggaran, yaitu mempersiapkan pembukaan, melakukan pembelanjaan dan membuat transaksi, membuat perhitungan, mengawasi pelaksanaan, sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku, serta membuat laporan dan pertanggungjawaban keuangan.
- d) Menilai pelaksanaan anggaran, yaitu menilai pelaksanaan proses belajar mengajar, menilai bagaimana pencapaian sasaran program, serta membuat rekomendasi untuk perbaikan anggaran yang akan datang.<sup>17</sup>

**Azas-azas Anggaran Pembiayaan Pendidikan**

Dalam penetapan anggaran pembiayaan pendidikan, meliputi azas-azas sebagai berikut, yaitu:

- a) Azas plafond, bahwa anggaran belanja yang boleh diminta tidak melebihi jumlah tertinggi yang telah ditentukan,
- b) Azas pengeluaran berdasarkan mata anggaran, artinya bahwa pengeluaran pembelanjaan harus didasarkan atas nama anggaran yang telah ditetapkan,
- c) Azas tidak langsung, yaitu suatu ketentuan bahwa setiap penerima uang tidak boleh digunakan secara langsung untuk sesuatu keperluan pengeluaran.

## **B. Pelaksanaan Anggaran Pendidikan**

Dalam melaksanakan anggaran pendidikan, hal yang perlu dilakukan adalah kegiatan membukukan atau accounting. Pembukuan mencakup dua hal yaitu: pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang, serta tindak lanjutnya, yakni menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang. Jenis pengurusan ke dua disebut juga dengan pengurusan bendaharawan. Ada beberapa komponen yang perlu dibiayai dengan menggunakan uang dari dana belajar. Komponen-komponen tersebut meliputi:

1. Honorium untuk pemimpin /penanggung jawab edukatif.
2. Honorium untuk sumber belajar.
3. Honorium untuk pemimpin umum lembaga diklusemas.
4. Honorium untuk pinata usaha dan pembantu-pembantunya.
5. Biaya perlengkapan dan peralatan.
6. Biaya pemeliharaan prasarana dan sarana.
7. Biaya sewa/kontrak.
8. Dana untuk pengembangan usaha lembaga diklusemas.
9. Biaya-biaya lain untuk pengembangan dan biaya tak terduga.

Selain itu terdapat usaha-usaha yang bersifat pengabdian terhadap masyarakat yang membutuhkan dana, kegiatan itu antara lain:

1. Pemberian keringanan uang kursus bagi warga belajar yang kurang mampu.
2. Usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan mengajar tenaga sumber belajar.
3. Kegiatan-kegiatan yang bersifat pengabdian bagi kepentingan masyarakat sekitar.
4. Kesiadaan mengelola kejar usaha atau magang diklusemas.

Strategi suatu lembaga pendidikan secara administrasi dengan bagaimana seseorang memimpin melakukan upaya pengelolaan sumber daya dan sumber biaya yang terdapat di lingkungan suatu lembaga. Pengelola pendidikan harus mampu sebaik mungkin mencari pemasukan keuangan guna memenuhi kebutuhan dalam pendanaan pendidikan.

### C. Pengawasan Pembiayaan Pendidikan (Auditing)

Kegiatan pengawasan pembiayaan dikenal dengan istilah auditing yaitu kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan Bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang.

Pengawasan pembiayaan pendidikan bertujuan untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya. Secara sederhana proses pengawasan terdiri dari:

1. Memantau (monitoring)
2. Menilai

3. Malampirkan hasil temuan, baik pada kinerja aktual maupun hasilnya

Langkah atau tahapan yang harus dilakukan dalam proses pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan standar atau patokan, baik berupa ukuran kuantitas, kualitas, biaya maupun waktu.
- b. Mengukur dan membandingkan antara kenyataan yang sebenarnya dengan standar yang telah ditetapkan.
- c. Menentukan tindak perbaikan atau koreksi yang kemudian menjadi materi rekomendasi.<sup>18</sup>

Pada dasarnya adalah semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang. Bagi unit-unit yang ada di dalam departemen, mempertanggungjawabkan urusan ini kepada BPK melalui departemen masing-masing. Auditing sangat penting dan sangat bermanfaat bagi empat pihak, yaitu:

1. Bagi bendaharawan yang bersangkutan:
  - a. Bekerja dengan arah yang sudah pasti,
  - b. Bekerja dengan target waktu yang sudah di-tentukan,
  - c. Tingkat keterampilan dapat diukur dan dihargai,
  - d. Mengetahui dengan jelas batas wewenang dan kewajiban,
  - e. Ada kontrol bagi dirinya terhadap godaan penyalahgunaan uang.
2. Bagi lembaga yang bersangkutan:
  - a. Dimungkinkan adanya sistem kepemimpinan terbuka,
  - b. Memperjelas batas wewenang dan tanggungjawab antar petugas,
  - c. Tidak menimbulkan rasa saling mencurigai,
  - d. Ada arah yang jelas dalam menggunakan uang yang diterima,
3. Bagi atasannya:
  - a. Dapat mengetahui bagian atau keseluruhan anggaran yang telah dilaksanakan,

- b. Dapat mengetahui tingkat keterlaksanaan serta hambatannya demi menyusun anggaran tahun berikutnya,
  - c. Dapat diketahui keber-hasilan pengumpulan, penyimpanan dan kelancaran pengeluaran,
  - d. Dapat diketahui tingkat kecermatan dalam mempertanggungjawabkan,
  - e. Untuk memperhitungkan biaya kegiatan tahunan masa lampau sebagai umpan balik bagi perencanaan masa datang,
  - f. Untuk arsip dari tahun ke tahun.
4. Bagi badan pemeriksa keuangan:  
Ada patokan yang jelas dalam melaksanakan pengawasan terhadap uang milik Negara, Ada dasar yang tegas untuk mengambil tindakan apabila terjadi penyelewengan.

### **Kesimpulan**

Berangkat dari uraian-uraian diatas, maka makalah ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembiayaan pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses pengalokasian sumber-sumber pada kegiatan operasional pendidikan, meliputi perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan anggaran pendidikan, akuntansi dan pemeriksaan atau pengawasan anggaran pendidikan.
2. Penganggaran merupakan proses pengambilan keputusan untuk mengatur pemakaian sumber daya pada masa yang akan datang. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber pembiayaan dalam pendidikan adalah pendapatan lembaga pendidikan yang berasal dari pemerintah, orang tua peserta didik dan masyarakat.
3. Kegiatan manajemen pendidikan meliputi penganggaran, pembukuan atau penatausahaan serta pemeriksaan atau penilaian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdulloh, 1982, Sistem Administrasi Keuangan Negara, Jakarta, Karya Aksara  
Agustinus, 1987, Manajemen Strategi, Jakarta, Rupa Aksara,  
Ahmad Tafsir, 2013, Ilmu Pendidikan Islam, Bandung, Remaja Rosdakarya  
Mujamil Komar, 2007, Manajemen Pendidikan Islam, Malang,  
Erlangga Nasution, 1995, Asas-Asas Kurikulum, Jakarta, Bumi Aksara  
Tim Dosen UPI, 2011, Manajemen Pendidikan, Bandung ALPABETA  
Yeti Heryati & Mumuh Muksin, 2014, Bandung, Pustaka Setia